

ABSTRAK

Di dalam layanan jasa parkir telah menerapkan klausula baku yang mengandung klausula Eksonerasi atau pengalihan tanggung jawab, Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen melarang bagi pelaku usaha menerapkan klausula baku tersebut. Dalam penelitian ini terdapat identifikasi masalah yaitu bagaimana klausula baku menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 551/Pdt.G/2000/Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 124PK/PDT/2007 terkait persoalan kehilangan mobil di salah satu penyedia jasa layanan Parkir pihak penyedia jasa layanan parkir tersebut menolak bertanggung jawab atas kehilangan, Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap klausula baku kerusakan dan kehilangan dalam jasa layanan parkir, Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan yuridis normatif yaitu melalui pendekatan penelitian dengan cara meneliti dan mengkaji objek penelitian melalui pendekatan peraturan perundang-undangan yang sesuai isu hukum yang akan penulis teliti. Adapun hasil penelitian menurut penulis bahwa seharusnya jasa layanan parkir tidak membuat klausula baku yang dapat merugikan konsumen dan Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 551/Pdt.G2000/PN Jakarta Pusat *Juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 124PK/PDT/2007 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Parkir mengacu pada pasal 1327 KUHPerdara yang menyatakan pembatalan suatu persetujuan berdasarkan paksaan tidak dapat dituntut lain bila setelah paksaan berhenti persetujuan itu dibenarkan, baik secara tegas maupun secara diam-diam atau jika telah dapat dipulihkan seluruh keadaan sebelumnya.

Kata Kunci: Penerapan Klausula Baku, Layanan Jasa Parkir, Perlindungan Konsumen

ABSTRACT

In parking services, a standard clause has been applied which contains an exoneration clause or transfer of responsibility. In Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, it is prohibited for business actors to apply the standard clause. In this study there is an identification of the problem, namely how the standard clauses according to Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and how the judge's consideration in the decision Number 551/Pdt.G/2000/Central Jakarta District Court in conjunction with the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number: 124PK/PDT/2007 related to the problem of losing a car in one of the parking service providers, the parking service provider refuses to be responsible for the loss. The purpose of this study is to determine the effectiveness of the implementation of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection against the standard clauses of damage and loss in parking services. This research is a type of qualitative research that uses normative juridical, namely through a research approach by researching and examining the object of research through an approach to legislation that is in accordance with the legal issues that the author will examine. The results of the research according to the author that parking services should not make standard clauses that can harm consumers and Judges' Considerations in Decision Number 551/Pdt.G2000/PN Central Jakarta Juncto Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number: 124PK/PDT/2007 concerning Consumer Protection Services Parking refers to article 1327 of the Civil Code which states that the cancellation of an agreement based on coercion cannot be prosecuted otherwise if after the force stops the agreement is justified, either expressly or tacitly or if all previous conditions have been restored.

Keywords: *Application of Standard Clauses, Parking Services, Consumer Protection*